

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Achmad Rubaica, *Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan, Ajudikasi Jurnal ilmu Hukum* , 2018.
- Agus Setiawan, *Penalaran Hukum Yang Mampu Menwujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*, Jurnal Hukum MimbarJustia, 2017
- Asri Muhammad Saleh Dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Asshiddiqie Jimly, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, Jakarta: 2006.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Ri, Jakarta.
- Barlun, La Ode, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*, Kendari Unsultra Press, 2019.
- Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon independen Pemilukada Di Provinsi Aceh*, Sofmedia. Jakarta, 2012.
- CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung : Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004.
- enid Cambell dan e.J Glasson *el.al.*, *Legal Reserch*, The Law Book Company i.td., melbourne.
- Fahmi Amrusi dalam Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia : Bandung, 2012.
- Fatkurohman dkk, *Memahami Konstitusi di indonesia*, PT. Citra Aditya Baktu, Bandung, 2004.
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan negara*, Terjemahan Raisal Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006
- Joenaedi effendi dan Johny ibarahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan emperis*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Lodewijk Gultom, *eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, CV Gultom. Utomo, Bandung, 2007.
- Kopel, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan, Penelitian Kerjasama kemitraan dan Kopel*, 2013.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu kajian kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Permata aksara, Jakarta 2012.
- Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. National Democratic institute, Washington DC, 2011.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH Uii Press, Yogyakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* : edisi Revisi, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djismanjmsosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Ramlan Subakti, dkk, *Merancang Sistem Politik Demokrasi, Menuju Pemerintahan Presiden yang efektif*, Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Ramlan Subakti, *Memahami ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta: 1982.
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusi : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Robert Dahl, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor, Jakarta, 2001.
- Saldi isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokrasi :Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sekretariat Jendral MPR RI, "Risalah Rapat Panitia Ad Hoc i (sidang Tahunan 2000), Buku kedua Jilid 3C, 2000, hlm. 255. Dalam Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon independen Pemilukada Di Provinsi Aceh*, Sofmedia. Jakarta, 2012.
- Soimin & Masyurianto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2013.

Saldi isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional)*, Rajawali Pers, Depok, 2021

Tanto Lailan, *Pro-Kontra Kewenangan MK Dalam Menguji UU yang mengatur eksistensinya*, Jurnal Konstitusi 12 (4), Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Naskah Kompherensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI 1945, *Naskah Kompherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945*, Buku V Pemilihan Umum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).

Widodo Heru Dr., SH., M.Hum., *Hukum Acara Sengketa Pemilu pada Dinamik di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2018.

B. JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

Ahmad Rubaica, *Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan Ajudikas*, Jurnal ilmu Hukum, 2018. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/697> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.

Agus Setiawan, *Penalaran Hukum Yang Mampu Menwujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*, Jurnal Hukum MimbarJustia, 2017.

Adinda Thalia Salsabila, *Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasinya Terhadap Kepastian Hukum*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2023. http://eprints.unram.ac.id/view/creators/ADiNDA_THALiA=3ASALSABiLA=3A=3A.html Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.

Agung Widodo, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, VOLUME 14, NO.1, 2023

Baharuddin Riqiey, *Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2023. , <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/59> Diakses Pada 06 Agustus 2023.

Chicaho University. *edmund Burke Speech to the electors of Bristol 3 Nov. 1174*. <https://www.digitens.org/en/edmund-burke-speech-electors-bristol-1174.html> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.

ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hubungan Antar Lembaga Amandemen UUD 1945*

Guwasman Tatawu, *Hakekat Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Halu Oleo Law Review, Volume 1 issue 2, 2017.

- Herman, B, Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). *Penegasan Kedudukan Penjelasan suatu Undang-Undang : Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislatif Indonesia. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/612> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.
- Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Surya Kencana Satu :Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i2.288>. Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.
- Hardy Sallim, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-Xi/2013 JO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072 073/PUU-ii/2004)*, Universitas Tarumanagara. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2847> Diakses Pada 06 Agustus 2023.
- Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). *Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia
- Inoesentius Samsul, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?*, Vol. Vi, No. 10/ii/P3Di/ Mei, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014,
- Jenedri M. Gaffar. *Kedudukan, Fungsi dan Peran MK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal MK, Jakarta, 2009.
- Johansyah Johansyah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Solusi, 2019. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023
- Joko Widarto, 2014, "Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah". *LexJurnalica*, Vol 11 No. 2.
- Luthfi Widagdo eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010
- Mariyadi Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/734> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.
- Maruarar Siahaan *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2005

- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/9466/4256> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023.
- Soimin & Masyurianto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2013.
- Silalahi, W, *Kesiapan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4 (2), 2022.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1967.
- Tatawu, G, *Hakekat Hukum Putusan MK Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata a Negara)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,
- Prof.Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum, dkk, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2017.
- UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Refly Harun, "Putuskan-Tak Tangani Sengketa Pilkada MK Tak Bertanggungjawab", [http:// www. rumahpemilu.org/in/read/](http://www.rumahpemilu.org/in/read/). Di akses tanggal 28 Mei 2014.
- Rusli, Dkk, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pilkada*, *e-Journal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12, Universitas Tadulako, Desember 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pemilihan umum serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang batasan/definisi rezim pemilu dan rezim pemilu daerah/lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan MK Nomor 15 tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

D. Sumber Lainnya

Bunyi Dan Makna Pasal 22e Ayat 1 UUD 1945, Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/24/090000769/bunyi-dan-makna-pasal-22e-ayat-1-uud-1945> Di Akses Pada 31 Maret 2024.

Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada <https://www.mkri.id/index.php?id=18992&menu=2&page=web.Berita> di akses Pada 31 Maret 2024

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Puskapol. 2014. “Lembar Fakta”<https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/lembar-fakta-tentang-pilkada-langsung.html> Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537b6b65ee762/penghapusan-kewenangan-mk-tangani-sengketa-pemilukada-dikritik>. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023.

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> Di Akses Tanggal 12 November 2023.

Sipnopsis Perkara 97/PUU-Xi/2013 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_89_iPi%2097-PUU-Xi-2013 Di Akses Pada 31Maret 2024

Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> Di akses Pada Tanggal 22 Maret 2024.